**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruangan, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja)sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat( 2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Kecamatan Semarang Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis Kecamatan Semarang Tengah.

Pada tahun 2016 Kota Semarang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Semarang Tengah. Namun sebagai tindaklanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kota Semarang, maka dilakukan Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkat pemerintahan daerah yang mengakibatkan perlunya perubahan pada Renstra pada setiap SKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Tengah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Semarang, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Semarang.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2016–2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470 ) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18 ) ;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8 ) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61 ) ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83 );
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14) ;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123 ) ;
23. Perwal No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ;

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang bersifat teknis strategis jangka menengah 5 tahun dengan maksud adalah untuk menyediakan pedoman/acuan penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan, sehingga tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai alat untuk menterjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ;
2. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang ;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan ( RPTK ) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ;
4. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah terkait indikator kinerja eselon ;
5. Sebagai acuan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016–2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB I** | : | **Pendahuluan**  1.1 Latar Belakang  1.2 Landasan Hukum  1.3 Maksud dan Tujuan  1.4 Sistematika Penulisan | |
| **BAB II** | : | **Gambaran Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**  2.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Tengah  2.2 Sumber Daya Kecamatan Semarang Tengah  2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah  2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah. |
| **BAB III** | : | **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Semarang Tengah**  3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah.  3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.  3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  3.4 Penentua Isu-isu Strategis |
| **BAB IV** | : | **Tujuan, Sasaran** |
| **BAB V** | : | Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Semarang Tengah  **Strategi dan Arah Kebijakan**  Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Semarang Tengah |
| **BAB VI** | : | **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatatif |
| **BAB VII** | : | **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD |
| **BAB VIII** | : | **Penutup**  Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021 |

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Tengah**
   * 1. **Tugas**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

* + 1. **Fungsi**

Camat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
2. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3. penyelenggaraan pembinaankepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5. penyelenggaraan kerjasama;
6. penyelenggaraan sekretariat;
7. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
8. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
11. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dankegiatanKecamatan;
13. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dankegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
    * 1. **Struktur Organisasi**
14. Camat;
15. Sekcam membawahi:
16. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
17. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18. Seksi Pemerintahan;
19. Seksi Pembangunan;
20. Seksi Kesejahteraan Sosial;
21. Seksi Pelayanan Publik;
22. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
23. Jabatan Fungsional;

Dalam penjabaran tugas dan fungsinya tentu saja Kecamatan Semarang Tengah khususnya camat tidak melaksanakan sendiri, tetapi dibantu oleh perangkat-perangkatnya yang tersusun dalam struktur organisasi di Kecamatan Semarang Tengah Semarang, yang tercantum dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang seperti dalam bagan struktur organisasi dibawah ini.

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Tengah**

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS CAMAT

KA. SUB. BAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

KA. SUB. BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

KASI PELAYANAN PUBLIK

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

KASI PEMBANGUNAN

KASI PEMERINTAHAN

Sedangkan mengenai tugas dari masing-masing unsur tersebut, yaitu :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
8. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
9. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
11. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
12. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
14. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
15. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kecamatan;
16. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
17. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
18. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
19. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
20. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
21. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
22. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
8. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
9. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
10. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
11. menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
12. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
14. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
15. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
16. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
18. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
19. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
21. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
8. menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
9. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
10. menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
11. menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
12. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
13. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
14. menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
15. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW,di wilayah kerjanya;
16. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
17. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
20. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
22. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
23. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
24. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
26. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
28. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
8. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
11. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
12. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
14. menyiapkan kegiatanfasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
17. menyiapkan kegiatan fasilitasipemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
18. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
19. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
20. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
21. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
22. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
23. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
24. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
26. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
28. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
8. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
11. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
12. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
15. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
16. Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
17. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
18. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
19. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlabalainnya;
20. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
21. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
22. menyiapkan kegiatan administasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
23. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
24. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
25. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial
26. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
27. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi SeksiKesejahteraan Sosial;
28. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
29. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
30. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
31. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
33. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
8. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
9. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
10. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
11. menyiapkan kegiatanpembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
12. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
13. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
14. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
15. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
16. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
17. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
18. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
19. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
21. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. membagi tugas kepada bawahan;
3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. memeriksa hasil kerja bawahan;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
11. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
14. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
16. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
17. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
18. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
19. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
20. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
21. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
22. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
23. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
24. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
25. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
26. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
27. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
28. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
29. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
30. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
31. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing.

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik

1. **Sumber Daya Kecamatan Semarang Tengah**
2. **Sumber Daya Manusia**

Untuk menangani tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan perlu adanya sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan mempunyai dedikasi, jiwa pengabdian yang tinggi, yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutamanya pelayanan administrasi, dan sumber informasi data yang akurat, serta pelaporan-pelaporan yang cepat dan tepat.

Sampai dengan bulan Oktober 2017 jumlah ASN Kecamatan Semarang Tengah dan Kelurahan se-Kecamatan Semarang Tengah sejumlah 123 orang terdiri dari 83 orang Laki-laki dan 40 perempuan . Dari jumlah ASN tersebut, sebanyak 32 orang merupakan pegawai di Kecamatan, dan 91 orang di Kelurahan. Selain ASN Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki Non ASN, dimana untuk tahun 2017 terdapat 35 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Kecamatan Semarang Tengah didominasi oleh lulusan SMA dengan jumlah total sebesar 53 orang (43,09), lulusan S2, S1 dan D3 dengan jumlah total sebanyak 54 orang (43,90%). Sisanya berupa lulusan SD dan SMP sebanyak 16 orang (13,01 %).

Sedangkan untuk pegawai Non ASN terdiri dari, lulusan SD sebanyak 10 orang (28,57), lulusan SMP dan SMA sebanyak 21 orang (60,00 %) sisanya sebanyak 4 orang lulusan S1 (11,43 %) merupakan lulusan S1.

Komposisi pegawai Kecamatan Semarang Tengah berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

**pada Kecamatan Kota Semarang Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenjang Pendidikan** | **ASN** | | **Non ASN** | |
| **Jumlah** | **(%)** | **Jumlah** | **(%)** |
| 1. | S2 | 3 | 2,41 | - | - |
| 2. | S1 | 48 | 38,74 | 4 | 11,43 |
| 3. | D3 | 3 | 2,41 | - |  |
| 4. | SMA | 53 | 43,54 | 21 | 60,00- |
| 5. | SMP | - | - | - | - |
| 6. | SD | 16 | 12,90 | 10 | 28,57 |
| **JUMLAH** | | **123** | **100,00** | **35** | **100,00** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Semarang Tengah, per Oktober 2017*

Dalam hal peningkatan kapasitas pegawai Kecamatan Semarang Tengah, dari 123 pegawai sebanyak 42 pegawai (34,15 %) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

**Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Diklat Kepemimpinan** | **Jumlah Pegawai** | **Prosentase (%)** |
| 1. | ADUM / Pim IV | 41 | 33,34 |
| 2. | SPAMA / Pim III | 1 | 0,81 |
| 3. | SPAMEN / Pim II | - | - |
| **JUMLAH** | | **42** | **34,15** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kec. Smg Tengah, per Oktober 2017*

Dalam hal golongan/ruang, dari 123 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 4 pegawai (3,25 %), golongan III sebanyak 85 pegawai (69,11 %), golongan II sebanyak 29 pegawai (23,58 %), dan golongan I sebanyak 5 Pegawai (4,07) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang**

**pada Kecamatan Semarang Tengah**

**Bulan Oktober Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan / Ruang** | **Jumlah Pegawai** | **Prosentase (%)** |
| 1. | IV/b | 2 | 1,63 |
| 2. | IV/a | 2 | 1,63 |
| 3. | III/d | 36 | 29,27 |
| 4. | III/c | 26 | 21,14 |
| 5. | III/b | 12 | 9,76 |
| 6. | III/a | 11 | 8,94 |
| 7. | II/d | 1 | 0,81 |
| 8. | II/c | 9 | 8,13 |
| 9. | II/b | 7 | 5,69 |
| 10. | II/a | 11 | 8,94 |
| 11. | I/d | 2 | 1,63 |
| 12. | I/c | 3 | 2,44 |
| **JUMLAH** | | **123** | **100,00** |

*Sumber : Data Kepegawaian Kec.Semarang Tengah, per Oktober 2017*

Dalam hal kedudukan dalam organisasi, dari 123 pegawai terdapat 1 pegawai (0,81 %) yang menduduki eselon III/a, 1 pegawai (0,81 %) yang menduduki eselon III/b, 20 pegawai (16,26%) yang menduduki eselon IV/a, 57 pegawai (46,34 %) yang menduduki eselon IV/b, 44 pegawai (35,77) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon**

**dan Jabatan Fungsional Umum**

**Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan** | **Jumlah Pegawai** | **Prosentase (%)** |
| 1. | Eselon IIIa | 1 | 0,80 |
| 2. | Eselon IIIb | 1 | 0,80 |
| 3. | Eselon IVa | 20 | 16,15 |
| 4. | Eselon IVb | 57 | 45,96 |
| 5. | J F U | 44 | 36,29 |
| **JUMLAH** | | **123** | **100,00** |

*Sumber : Data kepegawaian Kec. Semarang Tengah, per Oktober 2017*

Berdasarkan data-data kepegawaian tersebut diatas tampak bahwa secara kuantitas, jumlah pegawai di kecamatan Semarang Tengah perlu ditambah karena idealnya 1 kecamatan dan 15 kelurahan berjumlah 170 orang dengan asumsi satu kelurahan minimal 10 orang sedangkan kondisi yang ada 158 orang (dengan ditambah Non ASN).

Secara kualitas baik dari kompetensi maupun kapabilitas masih perlu ditingkatkan hal ini tampak dari 84 pejabat struktural, baru 42 orang yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan. Kondisi ini mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kelurahan dan Kecamatan Semarang Tengah.

1. **Potensi, Sumber Daya Alam dan Penduduk**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas wilayah 604 Ha, dan terbagi menjadi 15 wilayah kelurahan, 75 RW, 485 RT. Adapun nama – nama kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Semarang Tengah adalah Kelurahan Miroto, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Kembangsari, Kelurahan Sekayu, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Karangkidul, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Pendrikan Kidul dan Kelurahan Pendrikan Lor. Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah berada di wilayah Kelurahan Miroto.

Kecamatan Semarang Tengah merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di pusat kota Semarang dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara
2. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

Gambar 2.2



Penduduk Kecamatan Semarang Tengah per Oktober 2017 adalah **62.057** jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak **30.319** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **31.738** jiwa. Kelurahan Gabahan merupakan Kelurahan yang terpadat penduduknya yaitu sebanyak **7.532** jiwa sedangkan Kelurahan Bangunharjo merupakan Kelurahan yang mempunyai penduduk paling sedikit yaitu **2.525** jiwa.Gambaran komposisi penduduk Kecamatan Semarang Tengah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Jumlah Penduduk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kelurahan** | **Luas**  **(Ha)** | **Jumlah** | | **Jumlah Penduduk** | | |
| **RW** | **RT** | **LK** | **PR** | **Jumlah** |
| 1. | Miroto | 34,52 | 5 | 42 | 2.283 | 2.474 | 4.757 |
| 2. | Brumbungan | 30,89 | 5 | 42 | 1.841 | 2.111 | 3.952 |
| 3. | Jagalan | 27,11 | 8 | 40 | 2.712 | 2.946 | 5.658 |
| 4. | Kranggan | 25,25 | 5 | 30 | 1.990 | 2.195 | 4.185 |
| 5. | Gabahan | 20,23 | 6 | 45 | 3.621 | 3.911 | 7.532 |
| 6. | Kbsari | 29,75 | 5 | 33 | 1.965 | 2.005 | 3.970 |
| 7. | Sekayu | 56,88 | 3 | 20 | 1.552 | 1.687 | 3.239 |
| 8. | Pandansari | 46,6 | 3 | 23 | 1.242 | 1.323 | 2.565 |
| 9. | Bangunharjo | 16,1 | 4 | 24 | 1.228 | 1.297 | 2.525 |
| 10. | Kauman | 28,67 | 5 | 17 | 1.847 | 1.331 | 3.178 |
| 11. | Purwodinatan | 49,2 | 6 | 35 | 2.180 | 2.275 | 4.455 |
| 12. | Kr.Kidul | 84,4 | 4 | 28 | 2.285 | 2.104 | 4.389 |
| 13. | Pekunden | 79,9 | 5 | 33 | 1,717 | 1.848 | 3.565 |
| 14. | P. Kidul | 30,32 | 5 | 34 | 1.251 | 1.410 | 2.661 |
| 15. | P. Lor | 36,79 | 6 | 43 | 2.605 | 2.821 | 5.426 |
|  | **Jumlah** | **596,61** | **75** | **482** | **30.319** | **31.738** | **62.057** |

***Sumberdata : Laporan Bulanan Kependudukan Kec.Semarang Tengah***

**Gambar 2.3**

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Struktur Umur**

***Sumberdata : Monografi Kec.Semarang Tengah***

**Gambar 2.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

***Sumberdata : Monografi Kec.Semarang Tengah***

**Gambar 2.5**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

***Sumberdata : Monografi Kec.Semarang Tengah***

Kecamatan Semarang Tengah memiliki letak yang strategis dimana berada di pusat perdagangan dan jasa kota Semarang. Kondisi ini disamping memberikan keuntungan secara ekonomi namun juga menimbulkan permasalahan dibidang yang lain antara lain sosial budaya, lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum. Di bidang sosial budaya, letak strategis Kecamatan Semarang Tengah memicu banyaknya pendatang dari berbagai daerah untuk menetap sementara (penduduk boro), sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk dan karakteristik penduduknya dimana cenderung individualistis dan kurang peduli terhadap lingkungan.

Dibidang ketentraman dan ketertiban, dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan sebagai pusat perdagangan dan jasa menimbulkan rawan pelanggaran ketertiban umum khususnya pelanggaran PKL.

1. **Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Semarang Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik, kurang baik bahkan ada yang sudah rusak tapi belum dihapuskan dari data aset.

* + - 1. **Bangunan Kantor**

Tabel 2.6

Data Bangunan Kantor Kec.Semarang Tengah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Gedung Kantor | Jumlah (Buah) | Kondisi |
| 1 | Gedung Kecamatan | 1 | Baik |
| 2 | Gedung Pertemuan | 1 | Baik |
| 3 | Gedung Rumah Dinas Camat | 1 | Baik |
| 4 | Gedung Pelayanan Kependudukan | 1 | Baik |
| 5 | Gedung UPT Bapermasper | 1 | Baik |

*Sumber : Monografi Kec Semarang Tengah Semester I Tahun 2017*

Sarana pemerintahan di kelurahan se Kecamatan Semarang Tengah untuk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana Pelayanan Masyarakat Se -Kec. Semarang Tengah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan | Sarana Pelayanan Masyarakat | | | Keterangan/  Kondisi |
| Kantor | Balai Kel. | Lap OR |
| 1 | Miroto | 1 | 1 | ­1 | ­Baik |
| 2 | Brumbungan | 1 | 1 | 1 | ­Kantor Blm berstandar paten |
| 3 | Jagalan | 1 | 1 | - | ­ Kantor Blm berstandar paten |
| 4 | Kranggan | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 5 | Gabahan | 1 | 1 |  | Kantor Blm berstandar paten |
| 6 | Kembangsari | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 7 | Sekayu | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 8 | Pandansari | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 9 | Bangunharjo | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 10 | Kauman | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 11 | Purwodinatan | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 12 | Karangkidul | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 13 | Pekunden | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 14 | Pendrikan Kidul | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
| 15 | Pendrikan Lor | 1 | 1 | - | Kantor Blm berstandar paten |
|  | **JUMLAH** | **15** | **15** | **2** |  |

*Sumber : Data sarana Kec Semarang Tengah Tahun 2017*

* + - 1. **Sarana Prasarana Kerja**

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Semarang Tengah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

* + - * 1. Kantor Kecamatan

Sarana penunjang kerja di Kantor Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Data Sarana Kerja Kantor Kecamatan Semarang Tengah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis | Jumlah (buah) | Kondisi |
| 1 | Komputer | 4 | 2 baik 2 rusak |
| 2 | Laptop | 8 | 5 baik 3 rusak |
| 3 | Mesin Tik | 1 | Baik |
| 4 | Mesin Faximile | 1 | Baik |
| 5 | Printer | 8 | 5 baik 3 rusak |
| 6 | Kursi tunggu | 4 | Baik |
| 7 | Kursi lipat | 75 | Baik |
| 8 | Soundsystem | 1 | Baik |
| 9 | Podium | 1 | Baik |
| 10 | Meja rapat | 5 | Baik |

*Sumber : Simbada Kec Semarang Tengah Semester II Tahun 2016*

* 1. Kelurahan

Sarana kerja di Kantor Kelurahan se Kecamatan Semarang Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Data Sarana Kerja Kantor Kelurahan

Se- Kec. Semarang Tengah dengan kondisi baik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan | Sarana Kerja Aparatur | | | | | | |
| Lap top | Komputer | Prin ter | Msn ketik | LCD | Kursi Lipat | AC |
| 1 | Miroto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 |
| 2 | Brumbungan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 3 | Jagalan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 4 | Kranggan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 5 | Gabahan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 6 | Kembangsari | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 7 | Sekayu | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 8 | Pandansari | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 9 | Bangunharjo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 10 | Kauman | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 11 | Purwodinatan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 12 | Karangkidul | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 13 | Pekunden | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 |  |
| 14 | Pendrikan Kidul | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
| 15 | Pendrikan lor | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |  |
|  | **JUMLAH** | **18** | **30** | **30** | **30** | **15** | **4155** | **2** |

*Sumber : Simbada Kec. Semarang Tengah Semester II Tahun 2016*

3. Sarana Prasarana Penunjang

Kantor Kecamatan

Data Sarana Prasarana Penunjang Kerja Kantor Kecamatan Semarang Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.10

Data Sarana Penunjang Kerja Kantor Kecamatan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis | Jumlah (buah) |
| 1 | Kendaraan Dinas roda 4 | 2 |
| 2 | Kendaraan roda 3, operasional K3 | 4 |
| 3 | Kendaraan Operasional roda 2 | 6 |
| 4 | Mesin Potong Rumput | 1 |
| 5 | Gergaji mesin | 1 |

*Sumber : Simbada Kec Semarang Tengah Semester II Tahun 2016*

1. Kelurahan

Data Sarana Prasarana Penunjang Kerja Kantor Kelurahan se- Kecamatan Semarang Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.11

Data Sarana Penunjang Kerja Kantor Kelurahan

Se Kecamatan Semarang Tengah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelurahan | Sarana Penunjang Kerja | | |
| Roda 2 | Roda 3 | Potong Rumput |
| 1 | Miroto | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Brumbungan | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Jagalan | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Kranggan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Gabahan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Kembangsari | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Sekayu | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Pandansari | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Bangunharjo | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Kauman | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Purwodinatan | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Karangkidul | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Pekunden | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Pendrikan Kidul | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Pendrikan lor | 2 | 1 | 1 |
|  | **JUMLAH** | **30** | **15** | **15** |

*Sumber : Simbada Kec Semarang Tengah Semester II Tahun 2016*

* 1. **Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Semarang Tengah mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukannya didalam struktur organisasi yang ada.

Dalam pelaksanaan kinerja, para aparatur kecamatan selalu memperhatikan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan dan meningkatka koordinasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum**,** pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.

Berikut kami sampaikan gambaran pelayanan kinerja di Kecamatan Semarang Tengah selama tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 2. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2012-2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kota Semarang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Indikator Kinerja Sesuai Urusan/Program** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra Tahun ke** | | | | | **Realisasi Capaian Tahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian pada tahun ke** | | | | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | kelancaran Pelayanan administrasi SKPD |  |  | **78,60%** | **82,54%** | **87,02%** | **93,06%** | **100,00%** | **70,40%** | **74,10%** | **78,30%** | **83,20%** | **88,70%** | **89,56%** | **89,77%** | **89,98%** | **89,40%** | **88,70%** |
| 2 | kelancaran Pelayanan administrasi SKPD |  |  | **98,30%** | **98,78%** | **99,22%** | **99,61%** | **100,00%** | **93,40%** | **94,61%** | **98,20%** | **73,84%** | **93,86%** | **95,02** | **95,78** | **98,97** | **74,13** | **93,86** |
| 3 | kelancaran Pelayanan administrasi SKPD |  |  | **98,50%** | **99,00%** | **99,50%** | **99,75%** | **100,00%** | **97,50%** | **97,75%** | **98,50%** | **98,70%** | **98,90%** | **98,98** | **98,74** | **98,99** | **98,95** | **98,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cakupan pelayanan kebersihan di wilayah kecamatan |  |  | **91,00%** | **93,50%** | **96,00%** | **98,50%** | **100,00%** | **85,30%** | **87,80%** | **88,90%** | **90,10%** | **90,30%** | **93,74** | **93,90** | **92,60** | **91,47** | **90,30** |
| 5 | Cakupan pelayanan k-3 diwilayah titik pantau adipura |  |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **99,62%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00** | **99,62** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PBB |  |  |  | 17.034 | 16.842 | 16.908 | 16.908 |  | 13.883 | 13.827 | 13.952 | 14.009 |  | **81,50** | **82,10** | **82,52** | **82,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jumlah kantor kecamat an dan kelurahan yang berstandar Paten |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | **6,25** |  | **6,25** | **6,25** |
| 8 | Jumlah Pembinaan Kelurahan |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah |  |  | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **60,30%** | **65,80%** | **72,50%** | **82,30%** | **85,40%** | **60,30** | **65,80** | **72,50** | **82,30** | **85,40** |
| 10 | Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah |  |  | **61,37%** | **70,96%** | **80,54%** | **90,13%** | **100,00%** | **60,30%** | **65,80%** | **72,50%** | **82,30%** | **85,40%** | **98,25** | **92,73** | **90,01** | **91,31** | **85,40** |
| 11 | Persentase usulan yang diakomodir dalam musrenbang |  |  | **80,00%** | **85,00%** | **90,00%** | **95,00%** | **100,00%** | **73,20%** | **76,20%** | **71,30%** | **89,90%** | **100,00%** | **91,50** | **89,65** | **79,22** | **94,63** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dari tabel 2.12 Capaian target Indikator kelancaran pelayanan SKPD yang merupakan indikator dari 3 program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana aparatur seperti tampak pada tabel 2.8, tabel 2.9, tabel 2.10 dan tabel 2.11 dan belum semua seksi/bidang memiliki standar pelayanan sebagai ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan pubik. Di Kecamatan Semarang Tengah baru memiliki 2 SOP yaitu SOP pelayanan kependudukan, catatan sipil dan perijinan serta SOP Pengajuan SPP SPM dan pertanggung jawaban keuangan.

Untuk capaian target indikator program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yaitu jumlah kantor kecamatan dan kelurahan yang berstandar paten dan jumlah Pembinaan Kelurahan sudah tercapai 100%. Hal ini karena target yang ditetapkan baru 1 lokasi yaitu kecamatan sedangkan untuk 15 kelurahan yang lain belum ada yang berstandar paten, sehingga untuk lima tahun ke depan akan diprioritaskan untuk kelurahan.

Capaian target indikator program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan belum sesuai target karena belum maksimalnya tingkat partisipasi lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.13 dimana tampak tingkat kehadiran RT/RW dalam musrenbang 69,66% meskipun dalam rembug warga tingkat kehadiran RT 100%. Dari 69,69% yang hadir dalam musrenbang 79,12 % yang mengajukan usulan. Untuk usulan yang diakomodir 100% karena tidak ada usulan longlist. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini :

Tabel 2.13

Data Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Tahun 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KELURAHAN** | **JUMLAH** | | **J U M L A H R T** | | | | | | **KET** |
| **RT** | **RW** | **YANG HADIR** | **%** | **YANG USUL** | **%** | **YANG DIAKOMODIR** | **%** |
| 1 | MIROTO | 42 | 5 | 35 | 74,47 | 25 | 71,43 | 25 | 100 |  |
| 2 | BRUMBUNGAN | 35 | 5 | 28 | 70,00 | 20 | 71,43 | 20 | 100 |  |
| 3 | JAGALAN | 40 | 8 | 30 | 62,50 | 20 | 66,67 | 20 | 100 |  |
| 4 | KRANGGAN | 30 | 5 | 24 | 68,57 | 20 | 83,33 | 20 | 100 |  |
| 5 | GABAHAN | 45 | 6 | 35 | 68,63 | 25 | 71,43 | 25 | 100 |  |
| 6 | KEMBANGSARI | 33 | 5 | 25 | 65,79 | 16 | 64,00 | 16 | 100 |  |
| 7 | SEKAYU | 20 | 3 | 17 | 73,91 | 13 | 76,47 | 13 | 100 |  |
| 8 | PANDANSARI | 24 | 3 | 19 | 70,37 | 16 | 84,21 | 16 | 100 |  |
| 9 | BANGUNHARJO | 24 | 4 | 19 | 67,86 | 12 | 63,16 | 12 | 100 |  |
| 10 | KAUMAN | 17 | 5 | 17 | 77,27 | 25 | 147,06 | 25 | 100 |  |
| 11 | PURWODINATAN | 34 | 6 | 27 | 67,50 | 25 | 92,59 | 25 | 100 |  |
| 12 | KARANGKIDUL | 28 | 4 | 25 | 78,13 | 25 | 100,00 | 25 | 100 |  |
| 13 | PEKUNDEN | 33 | 5 | 28 | 73,68 | 20 | 71,43 | 20 | 100 |  |
| 14 | PENDRIKAN KIDUL | 34 | 5 | 24 | 61,54 | 20 | 83,33 | 20 | 100 |  |
| 15 | PENDRIKAN LOR | 43 | 6 | 35 | 71,43 | 25 | 71,43 | 25 | 100 |  |
|  | **JUMLAH** | **482** | **75** | **388** | 69,66 | **307** | 79,12 | **307** | 100 |  |

***Sumber: Data Musrenbang Kecamatan***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2012-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KOTA SEMARANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program / Kegiatan** | **Anggaran pada Tahun ke-** | | | |  | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke-** | | | | | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke** | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | Anggaran | Realisasi |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **453.864,00** | **470.358,00** | **416.917,000** | **491.949** | **532.033** | **412.547,05** | **422.685,17** | **379.852,414** | **432.074,047** | **476.507,590** | **90,9** | **93,1** | **80,8** | **103,6** | **96,9** | 19.542,25 | 15.990,14 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 69.314 | 60.978 |  |  |  | 62.289 | 57.588 |  |  |  | 89,9 | 94,4 |  |  |  | 26.321 | 26.444 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 108.720 | 105.900 | 138.770 | 173.850 | 271.152 | 82.959,768 | 93.888,395 | 116.525,998 | 139.190,634 | 219.224,591 | 76,3 | 88,7 | 84,0 | 80,1 | 80,8 | 40.608,00 | 34.066,21 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 43.980 | 38.100 | 38.100 | 30.900 | 42.653 | 43.974,60 | 38.100 | 38.100,00 | 30.900 | 42.653,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | (331,75) | (330,40) |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.000 | 20.740 | 18.415 | 19.069 | 30.400 | 20.469,05 | 20.318 | 18.413,20 | 18.554 | 30.394,90 | 97,5 | 98,0 | 100,0 | 97,3 | 100,0 | 2.350,00 | 2.481,46 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.300 | 4.300 | 2.000 | 1.500 | 1.750 | 3.731,40 | 2.416,725 | 1.981,50 | 710 | 1.672,00 | 59,2 | 56,2 | 99,1 | 47,3 | 95,5 | (1.137,50) | (514,85) |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 105.050 | 110.040 | 103.240 | 88.900 | 110.079 | 100.673,50 | 98.627,50 | 103.239,00 | 87.400 | 106.601,00 | 95,8 | 89,6 | 100,0 | 98,3 | 96,8 | 1.257,25 | 1.481,88 |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12.500 | 25.600 | 15.000 | 12.500 | 20.000 | 12.496,80 | 12.139,50 | 9.671,40 | 9.305,400 | 19.963,099 | 100,0 | 47,4 | 64,5 | 74,4 | 99,8 | 1.875,00 | 1.866,57 |
| Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD | 28.500 | 23.900 | 20.100 | 70.980 |  | 28.188,765 | 23.215,564 | 18.629,831 | 60.810,543 |  | 98,9 | 97,1 | 92,7 | 85,7 |  | 14.160,00 | 10.873,93 |
| Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD | 58.500 | 23.900 | 20.100 | 27.150 |  | 57.764 | 22.428,946 | 18.461,948 | 23.984,561 |  | 98,7 | 93,8 | 91,9 | 88,3 |  | (10.450,00) | (11.259,87) |
| Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD | - | 56.900 | 20.100 | 32.900 |  | - | 53.992,544 | 17.616,537 | 28.380,909 |  |  | 94,9 | 87,6 | 86,3 |  | (12.000,00) | (12.805,82) |
| Belanja Jasa Penunjag Administrasi Perkantoran |  |  | 41.092 | 34.200 | 55.999 |  |  | 37.213,000 | 32.838 | 55.999 |  |  | 90,6 | 96,0 | 100,0 | 13.999,75 | 13.999,75 |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **363.500,50** | **349.592,62** | **1.427.483,50** | **2.004.058,600** | **1.261.997,000** | **345.750,03** | **330.747,00** | **1.401.765,84** | **1.479.750,477** | **1.184.453,104** | 95,1 | 94,6 | 98,2 | 73,8 | 93,9 | 224.624,13 | 209.675,77 |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | 129.717,63 | 313.125 |  | 62.968 |  | 127.289 | 311.268,25 |  | 49.758,65 |  | 98,1 | 99,4 |  | 79,0 | 15.742,00 | 12.439,66 |
| Pengadaan Peralatan Gedung kantor |  |  |  | 876.375 | 48.412 |  |  |  | 402.880,400 | 41.829,50 |  |  |  | 46,0 | 86,4 | 12.103,00 | 10.457,38 |
| Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas |  | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 7.950 |  | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 6.200 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 78,0 | 1.987,50 | 1.550,00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | 23.400 | 31.636 | 19.500 | 334.080 |  | 23.400 | 31.234,300 | 19.500 | 327.180 |  | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 97,9 | 83.520,00 | 81.795,00 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | 179.815 | 201.022,50 | 103.523,600 | 115.728,000 |  | 164.123 | 183.589,398 | 69.619,002 | 79.060,579 |  | 91,3 | 91,3 | 67,2 | 68,3 | 28.932,00 | 19.765,14 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  | 9.200 | 13.500 | 14.800 | 25.350 |  | 8.475 | 9.655 | 8.768 | 22.772,50 |  | 92,1 | 71,5 | 59,2 | 89,8 | 6.337,50 | 5.693,13 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  | 4.735 |  |  |  |  | 94,7 | 1.250,00 | 1.183,75 |
| Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor |  |  | 861.000 | 982.260 | 654.509 |  |  | 859.754 | 972.089 | 650.634 |  |  | 99,9 | 99,0 | 99,4 | 163.627,25 | 162.658,50 |
| Penyediaan jasa pemeliharan & Perijinan kendaraan dinas operasional |  | 5.660 |  | 5.500 | 8.000 |  | 5.660 |  | 4.794,075 | 2.282,875 |  | 100,0 |  | 87,2 | 28,5 | 2.000,00 | 570,72 |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **36.222,50** | **37.448,00** | **84.381,00** | **79.832** | **99.598** | **36.102,50** | **37.388,00** | **84.151,00** | **79.757** | **95.003** | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 95,4 | 15.843,88 | 14.725,13 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 3.196 | 2.056 | 5.641 | - |  | 3.156 | 2.056 | 5.616 | - |  | 98,7 | 100,0 | 99,6 |  | 1.222,50 | 1.230,00 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  |  | 3.395 | 3.708 | 4.240 |  |  | 3.395 | 3.708 | 4.240 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Penyusunan rka dan dpa skpd |  |  | 8.425 | 4.897 | 6.040 |  |  | 8.375 | 4.847 | 6.040 |  |  | 99,4 | 99,0 | 100,0 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Penyusunan Lakip |  | 1.120 | 1.795 | 2.818 | 3.650 |  | 1.120 | 1.795 | 2.818 | 3.650 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 912,50 | 912,50 |
| Penyusunan renstra SKPD |  |  |  | 3.761 | 9.500 |  |  |  | 3.761 | 7.900 |  |  |  | 100,0 | 83,2 | 2.375,00 | 1.975,00 |
| Penyusunan renja SKPD |  | 2.120 | 3.360 | 4.931 | 3.940 |  | 2.120 | 3.340 | 4.931 | 3.940 |  | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 985,00 | 985,00 |
| Penunjang Kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu |  | 29.892 | 63.555 | 51.255 | 68.475 |  | 29.892 | 63.395 | 51.255 | 65.480 |  | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 95,6 | 17.118,75 | 16.370,00 |
| Penyusunan LKPJ SKPD |  | 1.120 | 1.795 | 2.821 | 3.753 |  | 1.120 | 1.795 | 2.821 | 3.753 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 938,25 | 938,25 |
| **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah** | **96.862,00** | **81.000,00** | **81.000,00** | **75.000** | **81.128** | **12.754,50** | **20.320,75** | **67.568,50** | **60.585** | **68.233,25** | 13,2 | 25,1 | 83,4 | 80,8 | 84,1 | (3.933,50) | 13.869,69 |
| **Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan** |  | **81.000,00** | **81.000,00** | **75.000** | **81.128** |  | **20.320,75** | **67.568,50** | **60.585** | **68.233,25** |  | 25,1 | 83,4 | 80,8 | 84,1 | 20.282,00 | 17.058,31 |
| **Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH** |  |  | **34.400,00** | **62.126** | **206.545** | **12.754,50** | **20.320,75** | **33.350,00** | **56.865,500** | **205.677,00** |  |  | 96,9 | 91,5 | 99,6 | 51.636,25 | 48.230,63 |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kec |  |  | **34.400,00** | **62.126** | **65.675** |  |  | **33.350,00** | **56.865,500** | **65.220,00** |  |  | 96,9 | 91,5 | 99,3 | 16.418,75 | 16.305,00 |
| Implementasi Penyelenggaraan Paten |  | **43.500,00** |  | **87.800** | **140.870** |  | **41.605,00** |  | **84.849,000** | **140.457,00** |  | 95,6 |  | 96,6 | 99,7 | 35.217,50 | 35.114,25 |
| **Urusan Wajib Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **279.760,00** | **293.265,00** | **263.324,50** | **286.384,20** | **356.200,00** | **272.727,00** | **284.987,00** | **254.928,50** | **267.523,019** | **325.673,825** | 97,5 | 97,2 | 96,8 | 93,4 | 91,4 | 19.110,00 | 13.236,71 |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan | 115.380 | 113.190 | 110.239,50 | 128.557 | 143.860 | 112.607 | 111.053 | 108.663,50 | 120.003 | 134.629,000 | 97,6 | 98,1 | 98,6 | 93,3 | 93,6 | 7.120,00 | 5.505,50 |
| Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 164.380 | 180.075 | 153.085 | 157.827,20 | 212.340 | 160.120 | 173.934 | 146.265 | 147.520,019 | 191.044,825 | 97,4 | 96,6 | 95,5 | 93,5 | 90,0 | 11.990,00 | 7.731,21 |
| **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | **32.000,00** | **44.600,00** | **29.420,00** | **47.620** | **62.040** | **32.000,00** | **44.429,00** | **29.420,00** | **47.620** | **62.040** | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura | 32.000 | 44.600 | 29.420 | 47.620 | 62.040 | 32.000 | 44.429 | 29.420 | 47.620 | 62.040 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **51.120,00** | **516.400,00** | **1.134.450,00** | **1.108.050** | **2.833.205** | **51.120,00** | **512.340,00** | **1.130.475,00** | **1.105.200** | **2.791.877** | 100,0 | 99,21 | 99,65 | 99,74 | 98,54 | 695.521,25 | 685.189,25 |
| Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | 37.800 | 514.600 | 1.133.100 | 1.106.700 | 2.429.825 | 37.800 | 510.540 | 1.129.125 | 1.103,850 | 2.390.915 | 100,0 | 99,21 | 99,65 | 0,10 | 98,40 | 598.006,25 | 588.278,75 |
| Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan | 13.320 | 1.800 | 1.350 | 1.350 | 403.380 | 13.320 | 1.800 | 1.350 | 1.350 | 400.962 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,40 | 97.515,00 | 96.910,50 |
| **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan** | **1.839.268** | **2.359.399** | **6.039.460,00** | **7.125.223** | **11.727.696** | **1.819.282** | **2.309.656** | **5.896.401,80** | **6.843.361,800** | **11.400.633,70** | 98,91 | 97,89 | 97,63 | 96,04 | 97,21 | 2.472.107 | 2.395.338 |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa | 65.180 | 71.554,50 | 135.490,50 | 531.524 | 121.757 | 63.697,50 | 62.266,50 | 125.379,50 | 508.747,80 | 98.027,00 | 97,73 | 87,02 | 92,54 | 95,71 | 80,51 | 14.144,25 | 8.582,38 |
| Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 20.300 | 23.784,50 | 19.672,50 | 46.660 | 54.775 | 20.236 | 23.784,50 | 19.672,50 | 46.660 | 54.715 | 99,68 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,89 | 8.618,75 | 8.619,75 |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 30.888 | 33.520 | 36.285,00 | 42.110 | 31.400 | 29.525 | 32.140 | 33.680,00 | 38.210 | 30.270 | 95,59 | 95,88 | 92,82 | 90,74 | 96,40 | 128,00 | 186,25 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang | 112.500 | 170.056.475 | 1.000.000,00 | 1.003.300 | 1.772.587 | 109.995 | 166.909.000 | 993.592,80 | 1.000.153 | 1.748.148,5 | 97,77 | 98,15 | 99,36 | 99,69 | 98,62 | 415.021,75 | 409.538,38 |
| Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum | 37.500 | 56.250 | 275.000.000 | 275.000.000 | 519.795 | 33.445 | 54.488,50 | 271.153 | 229.864 | 466.052,20 | 89,19 | 96,87 | 0,10 | 0,08 | 89,66 | 120.573,75 | 108.151,80 |
| Pemberdayaan masyarakat dlm peningkatan kualitas jalan dan jembatan | 657.229,50 | 881.526,80 | 1.243.798,05 | 1.699.867 | 3.147.650 | 653.646 | 876.663 | 1.222.031 | 1.665.670 | 3.107.053 | 99,45 | 99,45 | 98,25 | 97,99 | 98,71 | 622.605,13 | 613.351,75 |
| Pemberdayaan masyarakat dlm peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman | 561.342 | 799.835,10 | 2.070.706,00 | 1.745.336 | 3.889.157 | 557.366 | 777.409 | 2.004.136 | 1.721.292 | 3.883.987 | 99,29 | 97,20 | 96,79 | 98,62 | 99,87 | 831.953,75 | 831.655,25 |
| Pemberdayaan masyarakat dlm peningkatan kualtias kehidupan | 281.428,50 | 228.072 | 1.185.495,95 | 1.727.096 | 2.190.575 | 279.162 | 222.781 | 1.174.945 | 1.583.695 | 2.012.381 | 99,19 | 97,68 | 99,11 | 91,70 | 91,87 | 477.286,63 | 433.304,75 |
| Pembinaan klp Masy Pemb Kel percontohan skpd | 21.500 | 21.600 | 17.784,000 | 22.250 |  | 21.404,80 | 21.050 | 17.464 | 20.525 |  | 99,56 | 97,45 | 98,20 | 92,25 |  | 250,00 | (293,27) |
| Pembinaan klp Masy Pemb Kel percontohan skpd | 21.500 | 21.600 | 17.784,000 | 16.665 |  | 21.500 | 21.600 | 17.104 | 15.320 |  | 100,0 | 100,0 | 96,18 | 91,93 |  | (1.611,67) | (2.060,00) |
| Pembinaan klp Masy Pemb Kel percontohan skpd |  | 21.600 | 17.784,000 | 15.415 |  |  | 20.790 | 17.244 | 13.225 |  |  | 96,25 | 96,96 | 85,79 |  | (3.092,50) | (3.782,50) |
| Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD | 29.900 | 30.000 |  |  |  | 29.209 | 29.775 | - |  |  | 97,69 | 99,25 |  |  |  | 100,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan telaah RTRW Kecamatan Semarang Tengah, dimana berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 Kecamatan Semarang Tengah masuk BWK I yaitu Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, dapat dikemukakan tantangan dan peluang yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah.

**Tabel 2.18**

**Tantangan Dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan**

**Kecamatan Semarang Tengah**

|  |  |
| --- | --- |
| Tantangan | Peluang |
| 1. Perlu ditingkatkannya kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur. | 1. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal (diklat /kursus) maupun rekruitmen Non ASN guna peningkatan kualitas SDM.  2. Kebijakan dan dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi budaya kerja Aparatur dan penyusunan SOP |
| 2. Mengoptimalkan peran serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. | 2. Kebijakan dan dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam memfasilitasi kegiatan lembaga dan ormas. |
| 3. Kecamatan Semarang Tengah merupakan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa memiliki potensi rawan trantibum | 3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penegakan Perda. |
| 4. Posisi strategis Kecamatan Semarang Tengah memicu banyaknya pendatang untuk menetap sementara (penduduk boro), sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk dan karakteristik penduduknya dimana cenderung individualistis dan kurang peduli terhadap lingkungan. Hal ini berakibat pada munculnya masalah kesehatan dan lingkungan. | 4. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui program Kota Sehat. |

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah**

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Semarang Tengah beserta faktor-faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

**Kecamatan Semarang Tengah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PERMASALAHAN** | **AKAR PERMASALAHAN** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP . |
| Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar. |
| Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. |
| Belum optimalnya budaya kerja aparatur. |
| Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan. |
| 2. | Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan. |
| Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. |
| Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai. |
|  |  |  |
| **NO** | **PERMASALAHAN** | **AKAR PERMASALAHAN** |
| 3. | Perlu peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan. |
| Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan |
| 4. | Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan. |
| Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan. |
| Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan. |
| 5. | Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/ Kelurahan | Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. |
| 6. | Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan | Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan. |
| 7. | Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan | Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan. |
| 8. | Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan | Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. |

1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Semarang Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang .

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah : **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

**Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

**Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

**Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

**“Bergerak Bersama Membangun Semarang”**

Makna slogan **Bergerak Bersama Membangun Semarang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **HEBAT**, yang merupakan akronim dari ***Healthiness*** (kesehatan), ***Education*** (pendidikan), ***Building*** (infrastruktur fisik), ***Attitude*** (perilaku) dan ***Trading*** (perdagangan). Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep ***Think Globally Act Locally***, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memerhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional. Pembangunan Kota Semarang diarahkan agar hasilnya dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.

Terkait visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, salah satu tugas Kecamatan Semarang Tengah adalah menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis Kecamatan Semarang Tengah diarahkan pada perwujudan visi – misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, Kecamatan Semarang Tengah memiliki konstribusi dalam mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 2namun secara khusus mendukung pencapaian Misi 1**. Misi 1** yaitu “ **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas” .** Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut terdapat 2 tujuan pembangunan, dimana Kecamatan Semarang Tengah mendukung **tujuan 2 RPJMD** yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat,** dengan indikator tujuan “**Tingkat Partisipasi Masyarakat**”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan, dimana Kecamatan Semarang Tengah mendukung sasaran ke 3 **(Sasaran 5 RPJMD)** yaitu **meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan** dengan **indikator** sasaran p**ersentase tingkat** **partisipasi masyarakat**. Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 1 strategi (**Strategi 7 RPJMD)** yaitu **Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.** Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 2 arah kebijakan, dimana kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian arah kebijakan ke 2 **(Arah kebijakan 14 RPJMD)** yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk Misi 2 yaitu “**Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”.** Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut terdapat 2 tujuan pembangunan, dimana Kecamatan Semarang Tengah mendukung **tujuan 3 RPJMD** yaitu **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani,** dengan indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 2 sasaran pembangunan, dimana Kecamatan Semarang Tengah mendukung sasaran ke 1 **(Sasaran 6 RPJMD)** yaitu **Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani** dengan **indikator** sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat**. Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 1 strategi (**Strategi 9 RPJMD)** yaitu **Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.** Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 2 arah kebijakan, dimana kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian arah kebijakan ke 1 **(Arah kebijakan 20 RPJMD)** yaitu peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah RTRW dan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelaksanaan tugas pelayanan Kecamatan Semarang Tengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 Kecamatan Semarang Tengah masuk BWK I yaitu Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Kecamatan Semarang Tengah terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/ wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Semarang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktorpenghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.
5. **Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, terdapat 9 isu strategis. Dari kesembilan isu strategis tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah adalah isu strategis kelima, yaitu “**Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**”, dimana fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city), pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

Berdasarkan hasil-hasil telaahan tersebut di atas, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Rumusan isu strategis pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
   1. Jumlah kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan.
   2. Keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan public.
   3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP.
   4. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar.
   5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public.
   6. Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan
   1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
   2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.
   3. Kuantitas dan kualitas anggota linmas belum memadai.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat
   1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan.
   2. Koordinasi lintas sector untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan.
   3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak diantaranya perempuan dan organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
   2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan masih perlu perbaikan dan peningkatan.
   3. Potensi local kewilayahan masih perlu dukungan pembinaan dan pengembangan.
   4. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Peningkatan PHBS dan LHBS
   1. Pengelolaan kebersihan wilayah masih perlu ditingkatan secara berkelanjutan.
   2. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Semarang Tengah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Semarang Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai

Setelah mengidentifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas fungsi dalam memberikan pelayanan publik, menelaah tata ruang, penentuan isu – isu strategis, Kecamatan Semarang Tengah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Semarang Tengah beserta indikatornya kinerjanya yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2016 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | | **Indikator** | **Satuan** | **Target Kinerja pada Tahun** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembanguan | | Tingkat partisipasi masyarakat | % | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| **Sasaran** | | **Indikator** | **Satuan** | **Target Kinerja pada Tahun** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | % | 58,73 | 82,11 | 82,21 | 82,33 | 82,45 |
| 2 | Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | Persentase capaian kinerja kecamatan | % | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  | Cakupan pengkoordina- sian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Semarang Tengah harus selaras dan konsisten dengan visi, misi dan RPJMD seperti disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**

**Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan**

**Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISI** | Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera | | |
| **Misi** | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| Meningkatnyabirokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang memberdaya kan masyarakat | **Sasaran 1 :**  Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | 1. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat | a. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan |
| b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat |
| 1. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkngan | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat |
|  | 1. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif |
|  | 1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan |
| Meningkatkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani | **Sasaran 2 :**  Meningkatkan manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraanpemerintahan umum dan kualitas pelayanan publik kecamatan/kelu rahan | 1. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Kecamatan/ Kelurahan |
| 1. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik | 1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik |
| 1. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamataan/ Kelurahan | 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset pemerintah di Kecamaatan dan Kelurahan |
| 1. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan | 1. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif |
| 1. Peningkatan kinerja pelayanan kecamatan semarang Tengah | 1. Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan |
| 1. Meningkatakan penyediaan dan kualitas sarana prasaarana aparatur |
| 1. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

* 1. **Rencana Program dan Kegiatan**

Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah adalah merupakan program prioritas RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 yang kami sesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah, selanjutnya di jabarkan kedalam rencana kegiatan yang di dasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program, sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan Semarang Tengah, untuk lokasi kegiatan adalah merupakan lokasi keberadaan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan secara langsung (kecamatan dan kelurahan).

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

* + 1. **Rencana Program**

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah selama tahun 2016-2021 antara lain:

* 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  4. Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
  7. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
  9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
  10. Pengembangan Lingkungan Sehat
  11. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
  12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  13. Program Peningkatan Intensifikasi PAD
  14. Pengelolaan Aset Pemerintah
      1. **Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
5. Penyediaan Makan Dan Minum
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
7. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
8. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
9. Belanja Jasa Penunjang administrasi Perkantoran
10. Operasional Kelurahan Miroto
11. Operasional Kelurahan Brumbungan
12. Operasional Kelurahan Jagalan
13. Operasional Kelurahan Kranggan
14. Operasional Kelurahan Gabahan
15. Operasional Kelurahan Kembangsari
16. Operasional Kelurahan Sekayu
17. Operasional Kelurahan Pandansari
18. Operasional Kelurahan Bangunharjo
19. Operasional Kelurahan Kauman
20. Operasional Kelurahan Purwodinatan
21. Operasional Kelurahan Karangkidul
22. Operasional Kelurahan Pekunden
23. Operasional Kelurahan Pendrikan Kidul
24. Operasional Kelurahan Pendrikan Lor
25. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
26. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
27. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
29. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
30. Pemeliharan rutin berkala Rumah dinas
31. Pemeliharan rutin berkala Kendaraan dinas /operasional
32. Pemeliharan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor
33. Pemeliharan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
34. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
36. PeningkatanPengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
37. Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja perangkat daerah
38. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
39. Penyusunan LKPJ SKPD
40. Penyusunan LKJiP
41. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
42. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
43. Penyusunan Renja SKPD
44. Penyusunan Renstra SKPD
45. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
46. Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
47. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
48. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
49. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur
50. Pembangunan Pusat Pembelajaran (BLC)
51. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
    2. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
52. Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
53. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah
54. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Persampahan
55. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
56. Koordinasi Penilaian Adipura
57. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Persampahan
58. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
    1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
    2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
59. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.
    1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan
    2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
    3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
    4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
    5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan sarana dan Prasarana Umum
    6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
    7. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
    8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat.
    9. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
60. Pengembangan Lingkungan Sehat
    * + - 1. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat
61. Peningkatan Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
    1. Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas
    2. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat
    3. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum.
62. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
63. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
64. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
65. Program Peningkatan Intensifikasi PAD

Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

1. Program Pengelolaan Aset Daerah
   * 1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
   1. **Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Semarang Tengah berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kep. Menpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Semarang Tengah disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Indikator Kinerja (Outcome)** |
|
|
| 1. | PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN | Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan |
| Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (gerbang hebat) |
| 2. | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN | Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang. |
|  |  | Persentase kehadiran RT dalam musrenbang |
| Persentase RT yang usul dalam musrenbang |
| 3. | PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Vol sampah terangkut dari TPS ke TPA |
| 4. | PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah titik pantau adipura di kecamatan dan kelurahan yang tertangani. |
| 5. | PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| Jumlah kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) |
| 6. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran |
| 7. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur |
| 8. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| 9. | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang berstandar paten |
|  |  | Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan. |
| 10. | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan KDH di Kecamatan |
| 11. | PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan |
| 12. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | Persentase jumlah siskamling di lingkungan RT |
| 13. | PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD | Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan |
| 14. | PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH | Jumlah Aset Daerah yang dikelola Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan |

* 1. **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Semarang Tengah adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Semarang Tengah, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

* 1. **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah bersumber pada dana APBD Kota Semarang. Kegiatan indikatif Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2016-2021 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Semarang Tengah secara lebih lengkap mengenai rencana program, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016-2021 dituangkan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL VI.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Semarang Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kota Semarang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TUJUAN / SASARAN** | **KODE** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME ) DAN KEGIATAN (OUPUT)** | | **DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)** | **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | | | | | | | | |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | |
| **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TUJUAN : Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan** | | | - | Tingkat partisipasi masyarakat | **%** | **69,00** |  | **70,00** |  | **71,00** |  | **72,00** |  | **73,00** |  | **75,00** |  |
| **SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan** | | | - | Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan | **%** | **56,00** |  | **58,73** |  | **82,11** |  | **82,21** |  | **82,33** |  | **82,45** |  |
|  | **3.1.06.05.16** | **Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup** | - | **Persentase jumlah titik pantau adipura yang tertangani** | **62.040.000** | **100** | **91.531.000** | **100** | **85.572.000** | **100** | **86.427.000** | **100** | **87.292.000** | **100** | **88.164.000** | **100** | **438.986.000** |
|  | **3.1.06.05.16** | Koordinasi Penilaian Adipura | - | Persentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani | 62.040.000 | 100 | 91.531.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.500.000 | 100 | 41.000.000 | 100 | 41.500.000 | 100 | 254.531.000 |
|  | **3.1.06.05.16** | Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | - | Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintahan kecamatan dan kelurahan |  |  |  | 312 | 45.572.000 | 312 | 45.927.000 | 312 | 46.292.000 | 312 | 46.664.000 | 1.248 | 184.455.000 |
|  | **3.1.06.05.23** | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | - | **Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis Masyarakat (STBM)** |  | 20 | **421.936.000** | **40** | **439.039.000** | **60** | **443.429.000** | **80** | **447.863.000** | **100** | **452.342.000** | **100** | **2.204.609.000** |
|  |  | - | **Kelurahan yang melaksanakan program lingkungan hidup bersih dan sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** | 15 | 15 |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  |
|  | **3.1.06.05.23** | Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat | - | Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS |  | 15 | 421.936.000 | 25 | 439.039.000 | 30 | 443.429.000 | 40 | 447.863.000 | 50 | 452.342.000 | 50 | 2.204.609.000 |
|  | **3.1.06.05.18** | **Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** | **-** | **Persentase jumlah siskamling di lingkungan RT** |  | **79,00** | **25.180.000** | **82,00** | **291.236.000** | **85,00** | **294.148.000** | **88,00** | **297.089.000** | **90,00** | **300.060.000** | **75,25** | **1.207.713.000** |
|  | **3.1.06.05.18** | Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum |  | Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan ganggungan trantibum di kelurahan dan kecamatan |  |  |  | 1,05 | 175.000.000 | 1,25 | 177.000.000 | 1,50 | 179.000.000 | 2,10 | 181.000.000 | 2,10 | 712.000.000 |
|  | **3.1.06.05.18** | Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat |  | Jumlah RT di Kelurahan se- Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan |  |  |  | 345 | 116.236.000 | 360 | 117.148.000 | 370 | 118.089.000 | 380 | 119.060.000 | 380 | 470.533.000 |
|  | **3.1.06.05.18** | Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas |  | Persentase RT yang memiliki Linmas |  | 69 | 25.180.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1.06.05.20** | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan** |  | **Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan** | **2.791.877.000** | **398** | **828.984.000** | **159** | **1.472.818.000** | **161** | **1.487.546.000** | **163** | **1.502.421.000** | **165** | **1.517.445.000** | **167** | **6.809.214.000** |
|  |  |  | **Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat)** |  | **2** |  | **6** |  | **9** |  | **12** |  | **15** |  | **15** |  |
|  | **3.1.06.05.20** | Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Kelurahan |  | Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan (LPMK dan PKK) | 2.390.915.000 | 403 | 783.984.000 | 410 | 1.387.818.000 | 415 | 1.422.546.000 | 420 | 1.437.421.000 | 425 | 1.452.445.000 | 2.073 | 6.484.214.000 |
|  | **3.1.06.05.20** | Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) |  | Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan | 400.962.000 | 12 | 45.000.000 | 72 | 85.000.000 | 15 | 65.000.000 | 15 | 65.000.000 | 15 | 65.000.000 | 129 | 325.000.000 |
|  | **3.1.06.05.21** | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan** |  | **Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang** | **11.400.633.700** | **50,00** | **15.450.240.000** | **51,00** | **15.273.178.000** | **52,00** | **15.291.436.000** | **53,00** | **15.518.518.000** | **55,00** | **15.716.626.000** | **55,00** | **77.249.998.000** |
|  |  |  | **Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang** |  | **97,70** |  | **98,30** |  | **98,87** |  | **99,04** |  | **99,50** |  | **99,50** |  |
|  |  |  | **Persentase RT yang usul dalam musrenbang** |  | **90,26** |  | **91,44** |  | **92,63** |  | **93,81** |  | **95,00** |  | **95,00** |  |
|  | 3.1.06.05.21 | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan |  | Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan | 98.027.000 | 16 | 103.965.000 | 16 | 148.877.500 | 16 | 150.877.500 | 18 | 155.750.000 | 20 | 160.750.000 | 86 | 720.220.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan |  | Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan | 54.715.000 | 225 | 66.187.500 | 225 | 75.500.000 | 225 | 77.500.000 | 225 | 80.000.000 | 225 | 82.250.000 | 1.125 | 381.437.500 |
|  | 3.1.06.05.21 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan |  | Jumlah kegiatan monev dan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan | 30.270.000 | 4 | 57.809.000 | 4 | 32.453.000 | 4 | 34.500.000 | 4 | 39.440.000 | 4 | 40.120.000 | 20 | 204.322.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang |  | Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan | 1.748.148.500 | 12 | 2.006.000.000 | 8 | 2.573.285.000 | 8 | 2.803.500.000 | 8 | 2.645.608.000 | 8 | 2.610.506.000 | 44 | 12.638.899.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan kualitas jalan dan jembatan |  | Jumlah paket kegiatan pembangun jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang | 3.107.053.000 | 49 | 3.570.100.000 | 52 | 4.545.403.000 | 40 | 4.845.000.000 | 40 | 4.950.720.000 | 40 | 4.989.000.000 | 221 | 22.900.223.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan |  | Jumlah paket kegiatan pembangun saluran lingkungan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang | 3.883.987.000 | 106 | 5.266.150.000 | 72 | 5.897.759.500 | 60 | 5.791.058.500 | 60 | 5.987.000.000 | 60 | 6.124.000.000 | 358 | 29.065.968.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang |  | Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan | 0 | 185 | 812.000.000 | 606 | 1.999.900.000 | 610 | 1.589.000.000 | 615 | 1.660.000.000 | 620 | 1.710.000.000 | 2.636 | 7.770.900.000 |
|  | 3.1.06.05.21 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat |  | Jumlah paket kegiatan pembangunan gapura, taman, tugu, balai, poskamling, lain-lain sarpras di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang | 2.012.381.000 | 40 | 3.076.850.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.21 | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Umum |  | Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik hasil musrenbang yang dilakukan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan | 466.052.200 | 138 | 491.178.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.15 | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** |  | **Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA** | **356.200.000** | **87** | **388.328.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.15 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan |  | Distribusi sampah dari TPS ke TPA | 143.860.000 | 87,00 | 137.300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.15 | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan |  | Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 212.340.000 | 312,00 | 251.028.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TUJUAN 2 : Meningkatnya Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani** | | | **-** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | % | 78,00 |  | 79,00 |  | 81,00 |  | 83,00 |  | 85,00 |  | 87,00 |  |
| **Sasaran 1 : Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan** | | | - | **Persentase Capaian Kinerja Kecamatan** | % | 92,11 | 6.238.169.000 | 93,50 | 6.181.917.000 | 95 | 5.218.737.000 | 96 | 5.274.237.000 | 97 | 5.330.293.000 | 98 |  |
|  |  |  | - | **Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kecamatan** | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | **3.1.06.05.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **476.507.590** | **100** | **6.238.169.000** | **100** | **6.181.917.000** | **100** | **6.243.737.000** | **100** | **6.306.174.000** | **100** | **6.369.236.000** | **100** | **6.369.236.000** |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan Jasa surat Komunikasi sumber daya air dan listrik |  | Jumlah rekening telepon, air, listrik dan koran kantor | 219.224.591 | 12 | 335.700.000 | 48 | 220.000.000 | 48 | 224.500.000 | 48 | 231.437.400 | 48 | 238.443.400 | 204 | 1.250.080.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | Jumlah Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan | 1.672.000 | 16 | 66.972.000 | 8 | 65.500.000 | 8 | 66.972.000 | 8 | 73.909.000 | 8 | 80.915.000 | 48 | 354.268.000 |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Jumlah alat tulis kantor yang disedikaan pada tahun berkenaan | 42.653.000 | 16 | 80.500.000 | 72 | 24.000.500 | 72 | 27.750.000 | 72 | 34.690.600 | 72 | 41.704.600 | 304 | 208.645.700 |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan | 30.394.900 | 16/16 | 35.420.000 | 6/48000 | 11.350.000 | 6/48000 | 11.625.000 | 6/48000 | 18.562.000 | 6/48000 | 25.568.000 | 40/192016 | 102.525.000 |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan makanan dan minuman |  | Jumlah kegiatan rapat | 106.601.000 | 16 | 525.000.000 | 72 | 125.000.000 | 72 | 145.750.000 | 72 | 152.687.000 | 72 | 159.693.000 | 304 | 1.108.130.000 |
|  | 3.1.06.05.01 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan | 19.963.099 | 12 | 4.996.125.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 106.937.000 | 5 | 113.943.000 | 32 | 5.392.005.000 |
|  | 3.1.06.05.01 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |  | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan | 0 |  | 0 | 17.385 | 4.539.672.000 | 17.385 | 4.516.840.000 | 17.385 | 4.523.777.000 | 17.385 | 4.530.783.000 | 69.540 | 18.111.072.000 |
|  | 3.1.06.05.01 | Penyediaan operasional Kelurahan |  | Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan |  |  |  |  | 996.120.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.01 | Belanja jasa penunjang Administrasi Perkantoran |  | Jumlah jasa tenaga non ASN dan kegitan untuk menunjang administrasi perkantoran | 55.999.000 | 12 | 198.452.000 | 19 | 125.274.500 | 9 | 125.300.000 | 9 | 132.237.000 | 9 | 139.243.000 | 58 | 720.506.500 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Miroto |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Brumbungan |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Jagalan |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Kranggan |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Gabahan |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Kembangsari |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Sekayu |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Pandansari |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Bangunharjo |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Kauman |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Purwodinatan |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Karangkidul |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Pekunden |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Pendrikan Kidul |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.01 | Operasional Kelurahan Pendrikan Lor |  | Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan | % |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.333.000 | 100 | 68.795.800 | 100 | 69.262.800 |
|  | 3.1.06.05.02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 1.184.453.104 | 100 | 1.287.197.000 | 100 | 1.425.049.000 | 100 | 1.439.300.000 | 100 | 1.453.693.000 | 100 | 1.468.229.000 | 100 | 7.073.468.000 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor |  | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan | 49.758.650 | 8 | 178.193.000 | 12 | 202.493.000 | 5 | 152.493.000 | 5 | 152.638.300 | 5 | 152.638.300 | 35 | 838.455.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Jumlah pengadaan fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan | 41.829.500 | 6 | 242.000.000 | 4 | 266.300.000 | 6 | 165.300.000 | 6 | 165.445.300 | 6 | 165.445.300 | 28 | 1.004.490.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan | 0 | 1 | 205.000.000 | 0 |  | 6 | 165.251.000 | 0 |  | 6 | 165.536.600 | 13 | 535.787.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas |  | Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | 6.200.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 48.300.000 | 12 | 48.300.000 | 12 | 48.445.300 | 12 | 48.445.300 | 60 | 217.490.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | 327.180.000 | 12 | 330.180.000 | 192 | 354.480.000 | 192 | 354.480.000 | 192 | 367.565.300 | 192 | 367.565.300 | 780 | 1.774.270.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional |  | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | 79.060.579 | 12 | 123.500.000 | 57 | 147.800.000 | 57 | 147.800.000 | 57 | 147.945.300 | 57 | 147.945.300 | 240 | 714.990.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | 4.735.000 | 5 | 11.500.000 | 5 | 35.800.000 | 5 | 35.800.000 | 5 | 35.945.300 | 5 | 35.945.300 | 25 | 154.990.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  | Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan | 22.772.500 | 8 | 25.900.000 | 8 | 50.200.000 | 8 | 50.200.000 | 8 | 50.345.300 | 8 | 50.345.300 | 40 | 226.990.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor |  | Jumlah perbaikan ringan/sedang gedung kantor | 650.634.000 | 4 | 137.924.000 | 4 | 286.376.000 | 3 | 286.376.000 | 3 | 451.917.600 | 3 | 300.917.000 | 17 | 1.463.510.600 |
|  | 3.1.06.05.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan dinas operasional |  | Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional | 2.282.875 | 27 | 9.000.000 | 60 | 33.300.000 | 60 | 33.300.000 | 60 | 33.445.300 | 60 | 33.445.300 | 267 | 142.490.600 |
|  | **3.1.06.05.06** | **Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | **Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **95.003.000** | **100** | **214.140.000** | **100** | **227.067.000** | **100** | **229.337.000** | **100** | **231.631.000** | **100** | **233.947.000** | **100** | **1.136.122.000** |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah |  | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan. | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 1.100.000 | 12 | 2.347.000 | 12 | 3.505.000 | 36 | 6.952.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan lapora prognosis realisasi anggaran |  | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1.170.000 | 1 | 2.217.000 | 1 | 3.375.000 | 3 | 6.762.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun |  | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun. | 4.240.000 | 5 | 6.529.000 | 5 | 8.356.000 | 5 | 8.356.000 | 5 | 8.356.000 | 5 | 8.356.000 | 25 | 39.953.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusuan RKA dan DPA |  | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 6.040.000 | 2 | 9.500.000 | 4 | 11.350.000 | 4 | 11.350.000 | 4 | 11.350.000 | 4 | 11.350.000 | 18 | 54.900.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan LKJiP |  | Jumlah dokumen LKJiP Perangkat Daerah yang tersusun | 3.650.000 | 1 | 5.250.000 | 1 | 7.100.000 | 1 | 7.100.000 | 1 | 7.100.000 | 1 | 7.100.000 | 5 | 33.650.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan Renstra Perangkat Daerah |  | Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun | 7.900.000 | 1 | 9.500.000 | 0 | 11.350.000 | 0 | 11.350.000 | 0 | 11.350.000 | 0 | 11.350.000 | 1 | 54.900.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah |  | Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah yang tersusun | 3.753.000 | 1 | 7.700.000 | 1 | 9.550.000 | 1 | 9.550.000 | 1 | 9.550.000 | 1 | 9.550.000 | 5 | 45.900.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu |  | Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu | 65.480.000 | 100 | 167.911.000 | 100 | 169.761.000 | 100 | 169.761.000 | 100 | 169.761.000 | 100 | 169.761.000 | 100 | 846.955.000 |
|  | 3.1.06.05.06 | Penyusunan Renja Perangkat Daerah |  | Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun | 3.940.000 | 1 | 7.750.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 9.600.000 | 5 | 46.150.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1.06.05.22** | **Program Peningkatan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan umum** | - | **Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berstandar paten** |  | **24,00** | **390.541.000** | **45,00** | **441.795.000** | **57,00** | **463.885.000** | **77,00** | **398.832.000** | **100,00** | **402.820.000** | **100,00** | **2.097.873.000** |
|  |  | - | **Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan** |  | **19.000** |  | **19.250** |  | **19.500** |  | **19.750** |  | **20.000** |  | **20.000** |  |
|  | 3.1.06.05.22. | Monitoring Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan | - | Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan kec dan kel |  | 6 | 541.000 | 4 | 21.795.000 | 4 | 23.885.000 | 4 | 25.832.000 | 4 | 30.820.000 | 22 | 102.873.000 |
|  | 3.1.06.05.22. | Implementasi Penyelenggaraan PATEN | - | Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan |  | 19.000 | 300.000.000 | 19.250 | 300.000.000 | 19.500 | 300.000.000 | 19.750 | 318.000.000 | 20.000 | 320.000.000 | 78.500 | 1.538.000.000 |
|  | 3.1.06.05.22. | Pengembangan budaya kerja da pembinaan mental rohani aparatur | - | Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan utk peningkatan kapasitas dan etos kerja |  |  |  | 8 | 20.000.000 | 8 | 22.000.000 | 8 | 25.000.000 | 8 | 30.000.000 | 32 | 97.000.000 |
|  | 3.1.06.05.22. | Pegembangan BLC | - | Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat |  | 6 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 22.000.000 | 13 | 250.000.000 |
|  | **3.1.06.05.26** | **Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah** | - | **Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kec dan Kel** |  |  |  | **91,50** | **32.609.000** | **93,60** | **32.935.000** | **94,31** | **33.265.000** | **95,69** | **33.597.000** | **95,69** | **132.406.000** |
|  | **3.1.06.05.26** | Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kec dan Kel | - | Persentase jumlah penerimaan PBB Kelurahan se-Kec tahun berkenaan |  | 91 |  | 91 | 32.609.000 | 92 | 32.935.000 | 93 | 33.265.000 | 94 | 33.597.000 | 94 | 132.406.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.25 | **Program Pengelolaan Aset Pemerintah** |  | **Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan** |  |  |  | 68 | 50.215.000 | 68 | 50.717.000 | 68 | 493.849.000 | 68 | 498.788.000 | 68 | 1.093.569.000 |
|  | 3.1.06.05.25 | Monitoring pengelolaan Aset Pemerintah |  | Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan |  |  |  | 68 | 50.215.000 | 68 | 50.717.000 | 68 | 493.849.000 | 68 | 498.788.000 | 68 | 1.093.569.000 |
|  | 3.1.06.05.19 | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** |  | Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan | **68.233.250** |  | **23.515.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.19 | Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |  | Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kec dan Kel | 68.233.250 | 86 | 23.515.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.24 | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** |  | **Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan KDH di Kecamatan** | **205.677.000** | **100** | **152.391.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.24 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan |  | Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan kec dan kel | 65.220.000 | 4 | 52.391.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.06.05.24 | Implementasi Penyelenggaraan Paten |  | Jumlah kelurahan berstandar Paten | 140.457.000 | 3 | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan perangkat daerah kecamatan yaitu urusan kewilayahan. Tabel Indikator Kinerja Kecamatan yang mendukung IKU Kota Semarang disajikan pada tabel 8.1, sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan kecamatan dapat dilihat pada tabel 8.2.

**Tabel 8.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Semarang Tengah**

**yang mendukung IKU Kota Semarang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD** | | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tingkat Partisipasi Masyarakat | % | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan**

**Yang mendukung Indikator Kinerja Daerah**

**Penyelenggaraan Bidang Urusan Kewilayahan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Daerah** | **Satuan** | **Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD** | | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang | % | 87 | 87,68 | 90,26 | 91,44 | 92,63 | 93,81 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang | % | 95 | 96,06 | 97,70 | 98,30 | 98,87 | 99,04 | 99,5 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang | % | 40 | 42,61 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2016 – 2021 dengan rancangan Rencana Strategis ( Renstra ) Perangkat Daerah dengan melibatkan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses konsultasi, musyawarah dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Semarang Tengah 2016 – 2021 ini.

Pelaksanaan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan melalui upaya dengan sungguh – sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas untuk mewujudkan masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Tengah khususnya dan masyarakat Kota Semarang pada umumnya.

Demikian Revisi Renstra Kecamatan Semarang Tengah, tahun 2016-2021 semoga dalam penyusunan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah demi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Juni 2018

CAMAT SEMARANG TENGAH

Drs. FRAVARTA SADMAN

Pembina Tk. I

NIP. 19660624 198603 1 005

**KATA PENGANTAR**

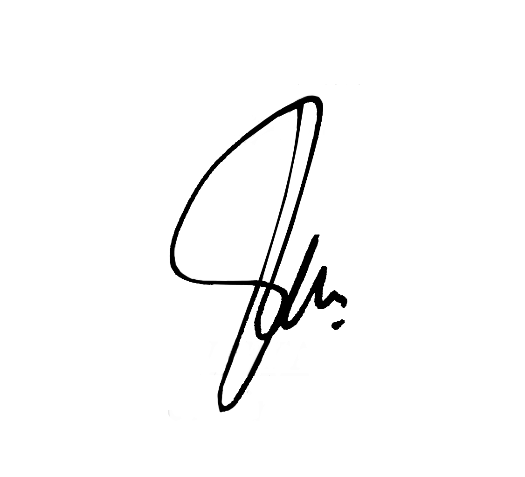
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016–2021 diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah khususnya Kecamatan Semarang Tengah.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021, maka kami menyampaikan terima kasih kepada para nara sumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini, terutama kepada pelaksana kegiatan yang akan bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan selama tahun 2016 – 2021.

Dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini telah kami upayakan sebaik mungkin, namun tentu saja tidak terlepas dari kekurangan – kekurangan yang disebabkan oleh kendala – kendala yang kami hadapi. Namun demikian kami tetap mengupayakan setiap kendala yang kami hadapi ini kami koordinasikan dengan pelaksana kegiatan. Semoga Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini dapat mencerminkan kinerja Kecamatan Semarang Tengah Khususnya dan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Semarang, 2018

 CAMAT SEMARANG TENGAH

Drs. FRAVARTA SADMAN

Pembina Tk. I

NIP. 19660626 198603 1 005

**KATA PENGANTAR**

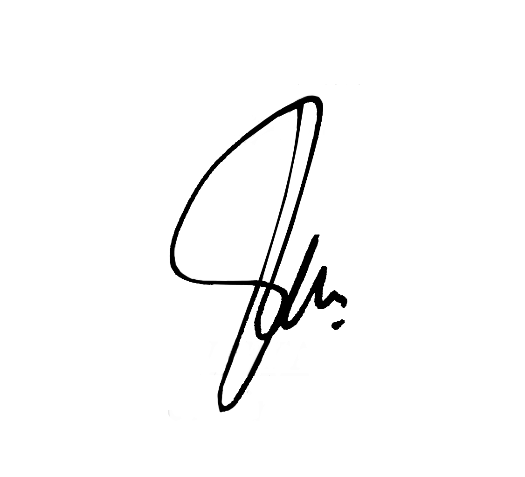
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016–2021 diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah khususnya Kecamatan Semarang Tengah.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021, maka kami menyampaikan terima kasih kepada para nara sumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini, terutama kepada pelaksana kegiatan yang akan bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan selama tahun 2016 – 2021.

Dalam penyusunan Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini telah kami upayakan sebaik mungkin, namun tentu saja tidak terlepas dari kekurangan – kekurangan yang disebabkan oleh kendala – kendala yang kami hadapi. Namun demikian kami tetap mengupayakan setiap kendala yang kami hadapi ini kami koordinasikan dengan pelaksana kegiatan. Semoga Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah tahun 2016 – 2021 ini dapat mencerminkan kinerja Kecamatan Semarang Tengah Khususnya dan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Semarang, Juni 2018

 CAMAT SEMARANG TENGAH

Drs. FRAVARTA SADMAN

Pembina Tk. I

NIP. 19660626 198603 1 005

**DAFTAR ISI**

Halaman

Kata Pengantar .................................................................................................. i

Daftar Isi ................................................................................................... ii

Daftar Tabel ................................................................................................... iii

Daftar Gambar ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

* 1. Latar Belakang ........................................................................... 2
  2. Landasan Hukum ..................................................................... 3
  3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 5
  4. Sistematika Penulisan ............................................................ 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH.. 8

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Semarang Tengah ....................................................................... 8

* 1. Sumber Daya Kecamatan Semarang Tengah ................. 21
  2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah ..... 33
  3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Semarang Tengah ............................................ 49

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

SEMARANG TENGAH ...................................................................... 50

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah... 50

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................... 51

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ........................... 55

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................... 55

BAB IV TUJUAN, SASARAN ............................................................................. 59

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................. 61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. 61

6.1 Rencana Program dan Kegiatan ........................................... 61

6.2 Indikator Kegiatan ..................................................................... 67

6.3 Kelompok Sasaran ..................................................................... 68

6.4 Pendanaan Indikatif .................................................................. 70

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............. 82

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................... 84

LAMPIRAN